

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DI KOTA JAMBI

M. ZAKI ANDRIAN GIGGS

32.0191

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.0191@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Aleknaek Martua, M.E.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The amount of waste in Jambi City has increased every year and has not been handled optimally. This problem requires cross-sector involvement in waste management, especially through the waste bank policy. Although the policy has been implemented, its effectiveness in realizing sustainable waste management still needs to be evaluated.* **Purpose :** *This study aims to analyze the implementation of the waste bank policy in Jambi City with a focus on the collaborative governance approach and identify supporting and inhibiting factors in its implementation.* **Method:** *The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were selected using purposive sampling techniques and consisted of representatives of the government, private sector, and community. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Results:** *The results of the study show that there are two dimensions, namely the Institutional Design dimension that has not run well on the Inter-Sector Empowerment indicator and the Policy Content dimension that has not run well on the Resources Used indicator. While the Initial Conditions dimension, the Facilitative Leadership dimension, and the Collaborative Process dimension show good results.* **Conclusion:** *This study concludes that the implementation of waste bank policy through collaborative governance is good. To increase the effectiveness of the waste bank policy, optimization of collaborative governance is needed through increasing resource capacity, strengthening incentive regulations, and ongoing educational efforts for the community.*

Keywords: *Policy Implementation, Collaborative Governance, Waste Bank*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah sampah di Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya dan belum tertangani secara optimal. Permasalahan ini menuntut adanya keterlibatan lintas sektor dalam pengelolaan sampah, terutama melalui kebijakan bank sampah. Meskipun kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan masih perlu dievaluasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi dengan fokus pada pendekatan collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri dari

perwakilan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua dimensi yakni dimensi Desain Kelembagaan yang belum berjalan dengan baik pada indikator Pemberdayaan Antar Sektor dan dimensi Isi Kebijakan yang belum berjalan dengan baik pada indikator Sumber Daya Yang Digunakan. Sedangkan pada dimensi Kondisi Awal, dimensi Kepemimpinan Fasilitatif, dan dimensi Proses Kolaborasi menunjukkan hasil yang baik. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan bank sampah melalui collaborative governance sudah baik. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bank sampah, diperlukan optimalisasi collaborative governance melalui peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan regulasi insentif, serta upaya edukatif yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Collaborative Governance, Bank Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang kompleks dan mendesak, termasuk di Kota Jambi yang merupakan daerah dengan timbulan sampah tertinggi di Provinsi Jambi (SIPSN, 2024). Kepedulian terhadap isu ini menjadi alasan utama penulis, sebagai warga Kota Jambi, tertarik meneliti kebijakan pengelolaan sampah, khususnya melalui pendekatan collaborative governance dalam implementasi bank sampah. Pendekatan ini menarik karena menuntut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan (pasal 1 ayat 1; pasal 4; pasal 5). Selain itu, kegiatan pengurangan dan penanganan sampah dijabarkan secara rinci dalam pasal 19 hingga pasal 22, yang mencakup prinsip 3R: reduce, reuse, dan recycle. Pemerintah juga menempatkan isu pengelolaan sampah sebagai program prioritas nasional untuk menghadapi krisis planet: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi (Sholihah, 2020). Data dari SIPSN tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari total 40,14 juta ton timbulan sampah nasional, hanya sekitar 60,38% yang berhasil dikelola. Provinsi Jambi mencatat angka pengelolaan tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu 73,30% (SIPSN, 2024). Namun demikian, tren di Kota Jambi memperlihatkan penurunan kinerja pengurangan dan penanganan sampah selama periode 2021–2023, meskipun secara total, volume sampah meningkat dari 158.106,98 ton pada 2021 menjadi 161.897,58 ton pada 2023.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Bank sampah berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengumpulan dan daur ulang sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penggerak ekonomi sirkular. Sistem pendukung seperti SIMBA mencatat terdapat 27.631 bank sampah aktif secara nasional pada 2024 (KLHK, 2024). Secara lokal, Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 dan Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2024 menggarisbawahi pentingnya pembentukan dan pembinaan bank sampah oleh pemerintah, swasta, dan

masyarakat. Namun, ditemukan kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama dalam dimensi desain kelembagaan (*institutional design*), yaitu belum adanya pemberdayaan konkret seperti sosialisasi instruksi wali kota kepada masyarakat (Chrislip & Larson dalam Ansell & Gash, 2007). Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* menekankan pentingnya partisipasi aktor negara dan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang formal dan deliberatif. Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 35 juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam pengelolaan bank sampah (Putri et al., 2022; Sulistiyorini et al., 2015). Dengan mempertimbangkan urgensi persoalan, kerangka hukum yang mendukung, serta potensi kolaborasi antarpihak, penelitian berjudul “*Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Jambi*” ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi model pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pendekatan tata kelola kolaboratif.

1.2 Gap Penelitian

Meskipun konsep *collaborative governance* telah banyak dibahas dalam literatur kebijakan publik, implementasinya dalam konteks pengelolaan sampah, khususnya melalui kebijakan bank sampah di tingkat daerah seperti Kota Jambi, masih belum banyak dikaji secara mendalam. Sejauh ini, penelitian yang menyoroti keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah seperti masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi masih sangat terbatas. Selain itu, meskipun Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Nomor 05 Tahun 2024 yang mewajibkan pembentukan bank sampah di berbagai sektor, belum ada kajian yang mengevaluasi sejauh mana sosialisasi, kesiapan kelembagaan, serta efektivitas implementasi kebijakan ini berlangsung di lapangan. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya data kualitatif yang menggambarkan dinamika relasi antar pemangku kepentingan lokal, serta persepsi mereka terhadap proses kolaborasi yang berjalan. Penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada peran pemerintah, sementara kontribusi masyarakat dan sektor swasta belum banyak dieksplorasi, padahal prinsip dasar dari *collaborative governance* adalah kesetaraan dan partisipasi aktif semua aktor. Di sisi lain, meskipun data menunjukkan tingginya angka pengelolaan sampah di Kota Jambi dibandingkan wilayah lain di Sumatera, penurunan jumlah sampah yang berhasil dikurangi dan terkelola pada tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan realitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengisi kekosongan ini dengan mengevaluasi praktik *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan bank sampah secara komprehensif di Kota Jambi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang membahas implementasi *collaborative governance* dalam berbagai kebijakan publik. Penelitian Pathuloh (2018) difokuskan pada sektor kesehatan, khususnya implementasi program JKN oleh BPJS di Kabupaten Garut, sehingga berbeda baik dari sisi konteks isu maupun lokasi. Syafi'i (2020) meneliti sistem zero waste di Kabupaten Sampang dengan dominasi peran pemerintah dan

belum optimalnya keterlibatan swasta serta masyarakat, sedangkan penelitian ini menemukan bentuk kolaborasi yang lebih aktif melalui CSR dan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Penelitian Khasanah dan Purwaningsih (2021) menyoroti kebijakan PSBB di DKI Jakarta, dengan latar yang sangat berbeda dari isu pengelolaan sampah dan menitikberatkan pada koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam krisis kesehatan. Sementara itu, studi Rupita et al. (2021) membahas kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat selama pandemi yang dilaksanakan dalam kondisi darurat, sehingga kolaborasi yang terjadi belum berjalan maksimal dan lebih bersifat formalistik. Penelitian Daniati (2023) menyoroti lemahnya implementasi Protokol Madrid terkait merek dalam negeri, dengan tantangan berbeda seperti kurangnya koordinasi dan minimnya evaluasi kebijakan.

Tiga penelitian lainnya yang lebih relevan secara tematik, yakni Amanda et al. (2024), Kurhayadi (2021), dan Ain et al. (2021), juga menunjukkan beberapa perbedaan penting. Amanda meneliti kolaborasi di TPS3R Makmur Jaya yang menghasilkan produk kompos namun belum mandiri secara kelembagaan. Kurhayadi menunjukkan bahwa kolaborasi dalam program KangPisMan di Bandung masih bersifat semi-formal dan bergantung pada komitmen tiap aktor. Ain et al. mencatat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di Bali meskipun ada kerangka hukum.

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi dengan pendekatan collaborative governance yang telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan sumber daya dan pemberdayaan antar sektor. Penelitian ini juga menekankan pentingnya regulasi insentif dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor.

Penelitian Adyatma et al. (2024) turut memberikan kontribusi dalam hal teknologi pendukung pengelolaan sampah melalui aplikasi Waste Bank yang mendapat umpan balik positif dari pengguna berdasarkan pengujian User Experience Questionnaire (UEQ). Meskipun skala Dependability masih tergolong terendah, nilainya tetap di atas rata-rata, menunjukkan bahwa aplikasi ini diterima baik dalam hal daya tarik dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Widaningsih dan Suheri (2021) juga menyoroti pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan bank sampah. Mereka mengusulkan penggunaan sistem QR code dalam manajemen data sampah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, serta mengurangi kesalahan input manual. Solusi ini telah terbukti praktis dan efektif dalam mempercepat proses administrasi bank sampah berbasis aplikasi Android.

Sementara itu, Budhijanto et al. (2024) menekankan tantangan keberlanjutan pada program TPS3R di Indonesia. Hanya sekitar 58,35% TPS3R yang berfungsi optimal, dan pengolahan sampah skala besar seperti TPST Sinduadi dinilai lebih efisien secara ekonomi dibandingkan skala kecil yang masih sangat bergantung pada hibah pemerintah. Mereka menyarankan perlunya kebijakan berbasis analisis ekonomi, jaminan pasar untuk produk daur ulang, sistem insentif-sanksi dalam pemilahan sampah, serta pemanfaatan teknologi untuk penerapan retribusi berbasis kepatuhan warga.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) yang ditunjukkan melalui fokus pada implementasi kebijakan bank sampah dengan pendekatan collaborative governance di Kota Jambi, yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi Aam Pathuloh (2018), Muhammad Syafi'i (2020), dan Putri Khasanah & Titin Purwaningsih (2021) yang membahas sektor kesehatan, pengelolaan sampah berbasis pemerintah daerah, serta kebijakan PSBB dalam konteks krisis pandemi, penelitian ini mengkaji kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan lingkungan berbasis masyarakat dengan manfaat ekonomi langsung. Kebaruan juga tampak jika dibandingkan dengan Amanda et al. (2024), Kurhayadi (2021), dan Ain et al. (2021) yang sama-sama mengangkat isu pengelolaan sampah, tetapi belum menyoroti aspek kebijakan bank sampah secara spesifik dan mendalam. Penelitian ini menambahkan dimensi baru melalui identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan bank sampah, termasuk peran regulasi daerah, program CSR sektor swasta, serta insentif ekonomi seperti tabungan emas. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari aktor kunci melalui *purposive sampling*, yang memberikan gambaran kolaborasi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur mengenai collaborative governance di bidang pengelolaan sampah berbasis kebijakan lokal dan menawarkan rekomendasi konkret untuk penguatan kolaborasi berkelanjutan antar sektor.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program bank sampah di Kota Jambi, serta mengkaji bentuk collaborative governance yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya mengenai collaborative governance dalam implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretive, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini dipilih karena sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial. Sejalan dengan itu, Neuman (2014) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah *exploratory*, *descriptive*, dan *explanatory*. Dalam konteks ini, metode deskriptif digunakan karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci dan akurat mengenai suatu fenomena sosial (Neuman, 2014). Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan penggambaran yang akurat dan mendetail mengenai fenomena yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2018), serta memungkinkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (Flick, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti mengoperasionalkan dua teori utama, yaitu Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007), serta teori Implementasi

Kebijakan dari Grindle (1980), yang masing-masing dikembangkan ke dalam konsep, dimensi, definisi, dan indikator secara sistematis. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pengelola dan nasabah Bank Sampah, serta pegawai fungsional dan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan pengelolaan sampah yang tersedia di website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Simangunsong, 2017). Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih secara khusus berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian (Simangunsong, 2017). Hal ini bertujuan agar informan yang dipilih benar-benar memahami permasalahan yang diteliti (Abdussamad, 2021). Penelitian ini terdiri dari 10 informan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup sebagai informan kunci, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Pengelola Bank Sampah, Nasabah Bank Sampah berjumlah 2 orang, dan Masyarakat berjumlah 5 orang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai *human instrument* yang menetapkan fokus, memilih informan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data. Peneliti sebagai instrumen dianggap paling tepat karena mampu menyesuaikan diri terhadap konteks dan mampu menangkap makna dari data yang dikumpulkan secara langsung (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami konteks secara menyeluruh dan menangkap data yang tidak terungkap dalam wawancara (Nasution dalam Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, agar peneliti dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan situasi di lapangan (Esterberg dalam Sugiyono, 2013). Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk mengumpulkan catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, atau dokumen elektronik (Sugiyono, 2013). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara, Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati, 2019:179). Adapun teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2013), yaitu melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memfokuskan pada data penting, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir yang menghasilkan temuan atau deskripsi mengenai fenomena yang diteliti. Namun demikian, Sugiyono (2013) menegaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti baru selama proses pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Februari selama satu bulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Implementasi oleh Merille S. Grindle serta Teori Collaborative Governance dari Chris Ansell dan Alison Gash. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup hasil observasi langsung di Bank Sampah Induk Dream Kota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, serta wawancara dengan pejabat, pegawai, pengelola bank sampah, nasabah, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan data yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Dream Kota Jambi.

3.1 Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Jambi

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dari sudut pandang ahli di bidang pemerintahan, khususnya teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan maupun keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan di sektor pemerintahan. Grindle menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi, yang masing-masing memiliki sejumlah indikator seperti kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya, kekuasaan, karakteristik lembaga, dan tingkat kepatuhan. Keberhasilan implementasi dapat dinilai dari proses pelaksanaan kebijakan dan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penulis menganalisis implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Jambi berdasarkan teori tersebut untuk menilai efektivitas dan pencapaian program di lapangan.

1. Isi Kebijakan

Dalam membuat suatu kebijakan ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, salah satunya yaitu dengan melihat isi dari suatu kebijakan yang dibuat haruslah memenuhi kebutuhan kelompok yang dituju. Isi suatu kebijakan adalah faktor yang paling penting dan harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan hal itu sangat menentukan pencapaian dari suatu kebijakan itu nantinya, dikarenakan suatu keberhasilan kebijakan adalah ketika sudah menyelesaikan tahapan penentuan dan penetapan isi kebijakan sebelum ditetapkan. Menurut Grindle dalam teorinya tentang implementasi kebijakan juga mengatakan bahwa isi kebijakan adalah hal yang paling penting dalam implementasi, dimana Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan apabila isi kebijakan memiliki enam kriteria dari teori implementasi kebijakan Grindle yaitu kepentingan-kepentingan terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Kota Jambi dalam melaksanakan implementasi kebijakan bank sampah ingin dilihat apakah dalam melaksanakan implementasi perda telah memenuhi indikator isi kebijakan yang sesuai dengan teori Grindle. Selanjutnya akan dijelaskan implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi menurut indikator-indikator dari isi kebijakan.

A. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Stakeholder memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, menilai bahwa pengelolaan sampah berkontribusi pada peningkatan kebersihan kantor dan pengurangan volume sampah ke TPA Talang Gulo, yang berdampak positif terhadap umur TPA dan penilaian Adipura. Fungsional pengendalian dampak lingkungan menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dan perubahan perilaku masyarakat. Pengelola Bank Sampah menyampaikan bahwa bank sampah membantu masyarakat menabung dari hasil pilahan sampah, mengurangi beban operasional perusahaan, dan mendukung pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah ke TPA. Nasabah bank sampah melihat manfaat dari sisi finansial dan lingkungan, sementara masyarakat umum menyatakan bahwa tiap pihak memiliki kepentingan berbeda: pemerintah fokus pada pengurangan sampah, swasta pada bahan daur ulang, dan masyarakat pada manfaat ekonomi serta lingkungan bersih. Keseluruhan wawancara menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat luas dan melibatkan berbagai kepentingan yang saling mendukung.

B. Tipe Manfaat

Implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi memberikan berbagai manfaat nyata bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menyampaikan bahwa pengurangan sampah ke TPA sangat membantu pemerintah, terutama karena keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan menyoroti perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih aktif dalam pengelolaan sampah. Pengelola Bank Sampah menjelaskan bahwa masyarakat memperoleh tabungan, perusahaan dapat menghemat biaya operasional, tumpukan sampah berkurang, dan peluang kerja terbuka. Nasabah bank sampah merasakan lingkungan yang lebih bersih serta keuntungan finansial dari daur ulang sampah. Masyarakat umum juga merasakan manfaat berupa lingkungan yang lebih bersih, pendapatan tambahan, peningkatan kesadaran lingkungan, dan tumbuhnya aktivitas sosial di sekitar kegiatan bank sampah. Keseluruhan hasil menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif yang luas dan mendukung tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Jambi.

C. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Penerapan kebijakan bank sampah di Kota Jambi bertujuan mengatasi peningkatan timbulan sampah dengan mengubah paradigma pengelolaan dari buang ke TPA menjadi pemilahan dan daur ulang sejak dari sumbernya. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan ini menunjukkan dampak positif. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah mengurangi tumpukan di TPS dan membuat kota lebih bersih. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan menilai perubahan perilaku nasabah bank sampah cukup signifikan, membentuk kepedulian lingkungan. Pengelola bank sampah menyoroti bahwa perubahan berjalan lambat karena kurangnya edukasi akibat keterbatasan anggaran, padahal edukasi penting untuk mengubah pola pikir masyarakat. Nasabah bank sampah menyebutkan bahwa kebiasaan memilah sampah semakin meluas dan membuka lapangan kerja baru. Masyarakat umum juga merasakan berkurangnya sampah liar, meningkatnya kesadaran pemilahan, dan munculnya kreativitas dalam mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi.

D. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi melibatkan berbagai stakeholder dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Wewenang utama berada pada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah, dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana utama kebijakan. OPD lain, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat juga turut berperan. Bank sampah, meskipun memiliki peran dalam pelaksanaan, mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh DLH. Beberapa informan juga menyebutkan adanya keterlibatan camat, lurah, akademisi, dan LSM lingkungan sebagai konsultan. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif, mengacu pada peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan bersama.

E. Pelaksana Program

Pelaksanaan kebijakan bank sampah di Kota Jambi melibatkan berbagai pihak seperti DLH, PHL, OPD terkait, sektor swasta, dan bank sampah, dengan penekanan pada peran aktif masyarakat melalui insentif dan sanksi. Pelaksana lainnya mencakup pengurus bank sampah tingkat kelurahan/RT, kader lingkungan, relawan, dan petugas DLH. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

F. Sumber Daya Yang Digunakan

Pengelolaan kebijakan bank sampah di Kota Jambi didukung oleh berbagai sumber daya, terutama sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya tenaga kerja dan armada operasional seperti dump truck dan motor. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan menyoroti peran pengelola bank sampah, masyarakat, dukungan dana dari APBD dan sektor swasta, infrastruktur seperti alat pengolah sampah, serta regulasi daerah yang mendukung kebijakan. Pengelola bank sampah menekankan bahwa keberhasilan bergantung pada edukasi dan partisipasi masyarakat, termasuk peran mahasiswa. Meskipun sarana tersedia, kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah.

2. Lingkungan Implementasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk memperhatikan lingkungan implementasi selain isi kebijakan itu sendiri. Faktor-faktor seperti perencanaan, kelompok sasaran, dan pelaksanaan turut memengaruhi keberhasilan kebijakan. Menurut Merillee S. Grindle, terdapat tiga indikator utama dalam aspek kebijakan, yaitu: kekuasaan, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; serta kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Lingkungan implementasi menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

A. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi, kepentingan dan kekuasaan para aktor sangat berpengaruh terhadap strategi yang dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan, diperoleh kesimpulan bahwa strategi pengelolaan sampah melibatkan berbagai pendekatan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menekankan pembinaan, penguatan kelompok swadaya masyarakat melalui TPS3R dan bank sampah, serta kerja sama dengan pengelola sampah mandiri dan 918 petugas kebersihan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan menyoroti pentingnya kolaborasi antar OPD sebelum melibatkan pihak swasta melalui dana CSR yang menunggu proposal menarik. Sementara itu, Pengelola Bank Sampah menekankan edukasi sederhana sebagai kunci keberhasilan pengelolaan bank sampah.

B. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Keberhasilan implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi dipengaruhi oleh karakter dan sikap para pelaksana di lingkungan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan lima informan, ditemukan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya sikap sopan dan humanis dari petugas kebersihan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan menyoroti perlunya kolaborasi karena keterbatasan sumber daya dan sampah yang menjadi isu serius. Pengelola Bank Sampah menilai masih kurangnya kepedulian masyarakat akibat minim edukasi, meskipun pihaknya tetap konsisten menjalankan tugas sesuai aturan. Nasabah bank sampah bersikap positif, tetapi mencatat tantangan dalam partisipasi dan kesinambungan program. Sementara itu, masyarakat menilai pelaksana awalnya antusias, namun semangat menurun tanpa pendampingan dan insentif yang memadai, meski ada pengurus bank sampah yang tetap berdedikasi.

C. Kepatuhan dan Responsivitas Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana kebijakan bank sampah di Kota Jambi secara umum cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan meraih Piala Adipura dua tahun berturut-turut. Pemerintah Kota Jambi dinilai konsisten dalam pengelolaan sampah, namun masih menghadapi tantangan dalam kesinambungan operasional dan partisipasi masyarakat. Pengelola bank sampah dan komunitas yang telah teredukasi menunjukkan dedikasi tinggi, tetapi keterlibatan masyarakat masih fluktuatif akibat minimnya edukasi. Dukungan dari pemerintah dan swasta turut membantu keberlanjutan program, meskipun masih terdapat kendala teknis dan turunnya aktivitas di beberapa bank sampah. Respons terhadap masukan masyarakat juga bervariasi tergantung kapasitas masing-masing pengelola. Untuk meningkatkan konsistensi, dibutuhkan edukasi berkelanjutan, insentif, dan kolaborasi yang lebih kuat antar pihak.

3.2 Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Jambi

Peneliti menggunakan konsep *collaborative governance* untuk mengkaji permasalahan pengelolaan sampah di Kota Jambi melalui bank sampah. Konsep ini melibatkan peran aktif dari tiga sektor utama: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian mengacu pada model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, yang mencakup empat parameter utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, dan proses kolaborasi. Tujuan penerapan konsep ini

adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Jambi.

1. Kondisi Awal

Dalam teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, kondisi awal (*starting condition*) merupakan fondasi penting yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antar sektor. Kondisi ini menjadi titik awal dalam pembentukan keputusan dan kebijakan berbasis konsensus. Terdapat tiga indikator utama dalam kondisi awal: ketidakseimbangan sumber daya atau perbedaan kemampuan antar pemangku kepentingan, insentif untuk berkolaborasi, serta riwayat konflik yang pernah terjadi di antara para pihak.

A. Kondisi Sumberdaya

Dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah, terdapat perbedaan kualitas dan kuantitas sumber daya antar sektor. Berdasarkan data, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi memiliki 75 aparatur dengan tingkat pendidikan beragam, mulai dari SD hingga Strata 3. Dari hasil wawancara, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menyampaikan bahwa DLH memberikan subsidi petugas untuk membantu delapan bank sampah aktif dan melakukan pengawasan rutin. Bank sampah berperan penting dalam pemilahan sampah rumah tangga, sehingga membantu mengurangi beban TPA dan menghasilkan nilai ekonomi. Sementara itu, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan menjelaskan bahwa DLH memiliki 10 penyuluh fungsional, namun pembinaan belum berjalan optimal karena keterbatasan fokus dan sarana prasarana yang minim, seperti kurangnya alat pengangkut sampah. Kesimpulannya, diperlukan penguatan strategi pembinaan dan peningkatan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

B. Insentif (Benefit)

Saat ini, belum terdapat insentif resmi dari pemerintah dalam mendukung program bank sampah karena keterbatasan anggaran dan belum adanya peraturan turunan dari Perda No. 5 Tahun 2020. Namun demikian, insentif alternatif tetap diberikan melalui skema yang dikelola oleh bank sampah. Insentif tersebut berupa manfaat finansial seperti tabungan dari hasil pemilahan sampah, tabungan emas bekerja sama dengan Pegadaian, serta uang tunai sesuai jenis dan berat sampah yang disetor. Selain itu, beberapa bank sampah juga memberikan produk hasil daur ulang atau kebutuhan pokok sebagai bentuk apresiasi. Meskipun insentif formal belum tersedia, upaya bank sampah ini terbukti mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

C. Riwayat Konflik

Dalam pelaksanaan kebijakan bank sampah di Kota Jambi, tidak ditemukan konflik signifikan antara para pemangku kepentingan. Namun, tantangan utama yang dihadapi terletak pada lambatnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dan kurangnya kesinambungan dalam edukasi yang diberikan. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Bank sampah sendiri berperan sebagai perpanjangan tangan DLH dalam mendidik masyarakat serta mengawasi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Sektor swasta juga mulai terlibat dalam program pengelolaan sampah,

terutama melalui kerja sama dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara partisipasi masyarakat meningkat seiring dengan dirasakannya manfaat ekonomi dan lingkungan dari program ini. Meskipun hubungan antar pihak semakin baik, masih diperlukan peningkatan koordinasi agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal. Ketidakeimbangan sumber daya antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga menciptakan tantangan dalam pelaksanaan kolaborasi. Insentif yang tersedia, seperti tabungan emas dan keuntungan finansial dari hasil pemilahan sampah, telah mendorong partisipasi masyarakat, tetapi kesadaran dan komitmen jangka panjang tetap perlu diperkuat.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Pada indikator desain kelembagaan dengan memperhatikan protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk legitimasi prosedural dan proses kolaboratif, hal ini merujuk pada keterlibatan atau partisipasi anggota, kemudian eksklusivitas masing-masing sektor, dan yang terakhir adalah aturan dasar yang mengikat yang diilhami oleh masing-masing stakeholders yang menjalankan perannya pada tindak kolaboratif ini.

A. Keikutsertaan Anggota

Indikator partisipasi stakeholder dalam tindak kolaboratif pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, berfokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan sampah, khususnya pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi untuk menambah pendapatan rumah tangga. Selain itu, keterlibatan pihak swasta juga terlihat aktif, seperti program “Memilah Sampah Menabung Emas” dari Pegadaian sejak 2019, yang didukung dengan dana CSR dan menjadikan bank sampah sebagai binaan Pegadaian. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang saling memengaruhi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong partisipasi masyarakat.

B. Eksklusivitas Masing-Masing Sektor

Indikator eksklusivitas menggambarkan adanya pembagian peran yang jelas antar stakeholder dalam forum kolaboratif pengelolaan sampah di Kota Jambi. Berdasarkan wawancara, masyarakat bertanggung jawab melakukan pemilahan sampah dan menyetorkannya ke bank sampah. Bank sampah menampung sampah terpilah, membuat tabungan sampah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi, sosialisasi, penyediaan fasilitas awal, pengelolaan TPS dan TPA, serta pengangkutan residu sampah. Sektor swasta, seperti Pegadaian, terlibat melalui program CSR dan pengolahan sampah yang bernilai ekonomi. Meski peran masing-masing sektor sudah terbentuk, regulasi yang belum mengatur secara rinci peran masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi, yang berdampak pada tingginya volume sampah yang masuk ke TPA.

C. Aturan Dasar Yang Mengikat

Indikator aturan dasar menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Jambi telah didukung oleh regulasi dari tingkat nasional hingga daerah. Regulasi utama mencakup UU No. 18 Tahun 2008, PP No. 81 Tahun 2012, Permen LHK No. 14 Tahun 2021, serta Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 yang dipertegas dengan Instruksi Walikota Tahun 2024 mengenai kewajiban pendirian bank sampah di tingkat RT hingga OPD.

Selain itu, terdapat Perwal terkait pembatasan penggunaan kantong plastik dan sanksi atas pelanggaran pembuangan sampah. Namun, berdasarkan wawancara dengan para informan, penerapan regulasi ini masih belum maksimal dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meski secara hukum sudah kuat, implementasinya masih lemah karena kurangnya kepedulian publik dan belum optimalnya pelibatan seluruh sektor.

3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash merujuk pada struktur, aturan, dan proses yang membentuk serta interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan kolaboratif. Desain kelembagaan ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi, memastikan adanya inklusivitas, transparansi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

A. Pemberdayaan Antar Sektor

Indikator pemberdayaan antar sektor dalam dimensi desain kelembagaan menunjukkan adanya kolaborasi yang cukup baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi. Pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, mendorong kemitraan antara TPS3R, bank sampah, dan pelaku usaha seperti hotel dan rumah makan, serta memberikan pelatihan, insentif, dan edukasi. Swasta, seperti Pegadaian, berperan aktif dalam pendampingan dan pendanaan melalui program CSR. Sementara itu, masyarakat dilibatkan dalam pemilahan sampah, penyetoran ke bank sampah, dan partisipasi dalam pelatihan serta sosialisasi. Meskipun kerja sama antar sektor sudah terbentuk dan berjalan, kesadaran masyarakat masih belum merata, dan regulasi belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi dan peran kepemimpinan fasilitatif agar kolaborasi ini dapat berkelanjutan dan berdampak lebih luas.

4. Proses Kolaborasi

A. Dialog Tatap Muka

Indikator dialog tatap muka mencerminkan tahap awal kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sampah, di mana komunikasi langsung diperlukan untuk menyamakan tujuan dan menyusun tindakan bersama. Di Kota Jambi, dialog ini berlangsung melalui berbagai forum seperti sosialisasi tahunan, pertemuan tingkat kelurahan, serta forum RT/RW dan komunitas lingkungan. Pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat daerah, meskipun keterlibatan dengan sektor swasta masih minim. Bank Sampah Induk memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah, tetapi terbatasnya jumlah penyuluh menyebabkan pendampingan belum maksimal. Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui forum kelurahan, ketua RT, dan media digital seperti media sosial dan aplikasi.

B. Pembangun Kepercayaan

Indikator pembangun kepercayaan menekankan pentingnya membangun keyakinan lintas sektor dalam pelaksanaan tindakan kolaboratif jangka panjang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, diketahui bahwa Pemerintah Kota Jambi

berupaya membangun kepercayaan publik dengan menjadi teladan dalam pengurangan sampah melalui Instruksi Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2024.

C. Komitmen Saat Berkolaborasi

Indikator komitmen kolaborasi mencerminkan rasa tanggung jawab dan keterikatan antar stakeholder dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, diketahui bahwa komitmen dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi diwujudkan melalui:

- Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmen lewat Instruksi Walikota yang mewajibkan pelaporan rutin oleh instansi, serta melalui Peraturan Walikota terkait pembatasan kantong plastik sejak 2018.
- Bank Sampah Induk Dream menjalin komitmen formal melalui MoU dengan mitra seperti rumah sakit, sekolah, dan perusahaan, sementara hubungan dengan DLH bersifat pembinaan langsung tanpa MoU.
- Masyarakat dan nasabah bank sampah menunjukkan komitmen dalam bentuk partisipasi aktif memilah sampah dan mendukung pengelolaan berkelanjutan, sambil berharap pada dukungan regulasi dan insentif agar program berjalan konsisten.

Secara keseluruhan, kolaborasi antar sektor telah menunjukkan bentuk komitmen nyata, meski kesinambungannya tetap membutuhkan penguatan regulasi dan dukungan kebijakan yang tepat.

D. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi menunjukkan perkembangan yang positif meskipun belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dan pengelola bank sampah telah memiliki pemahaman yang sejalan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah. Bank sampah dipandang sebagai unit sosial yang berfungsi sebagai sarana edukasi untuk mendorong perubahan perilaku, bukan sekadar unit bisnis yang mengejar keuntungan. Namun, di tingkat masyarakat, pemahaman masih beragam. Sebagian masyarakat mulai menyadari manfaat bank sampah, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, sementara sebagian lainnya masih memandangnya hanya dari aspek keuntungan finansial. Pemerintah menyadari bahwa perubahan perilaku ini membutuhkan waktu dan keterlibatan lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan PUPR, sangat penting untuk membentuk kebiasaan sejak dini. Seiring berjalannya waktu dan peningkatan partisipasi, diharapkan pemahaman bersama ini dapat semakin kuat dan merata guna mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

E. Hasil Sementara

Hasil sementara dari proses kolaboratif dalam implementasi kebijakan bank sampah di Kota Jambi menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih menghadapi tantangan. Jumlah nasabah bank sampah terus meningkat, dan Bank Sampah Induk Dream Kota Jambi menjadi kontributor utama dengan mengelola

sekitar 80% dari total sampah yang terkumpul. Kebijakan seperti penerapan denda memberikan efek jera yang mendorong masyarakat untuk memilah sampah guna mengurangi volume ke TPA. Dampak nyata dari kolaborasi ini mencakup peningkatan kebersihan lingkungan, berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA, serta tambahan pendapatan bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi. Beberapa bank sampah bahkan telah berkembang menjadi unit usaha yang menciptakan lapangan kerja. Meski begitu, edukasi secara berkelanjutan masih dibutuhkan, khususnya di tingkat RT dan kelurahan, agar masyarakat dapat memahami manfaat jangka panjang dari pengelolaan sampah, tidak hanya dari sisi ekonomi. Diagram dimensi proses kolaborasi menunjukkan bahwa meskipun dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen proses, dan pemahaman bersama telah berjalan, kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan agar manfaat lingkungan lebih dipahami secara luas.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi-studi terdahulu yang mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam kebijakan publik. Dari sisi konteks kebijakan, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Pathuloh (2018) dan Khasanah & Purwaningsih (2021) mengangkat isu di luar sektor pengelolaan sampah, yaitu sektor kesehatan (implementasi program JKN) dan kebijakan penanganan pandemi (PSBB), sehingga temuan dan tantangan yang dihadapi berbeda secara fundamental dengan konteks kebijakan bank sampah di Kota Jambi. Penelitian ini juga berbeda dengan studi Rupita et al. (2021) yang fokus pada kebijakan pendidikan di daerah perbatasan dan bersifat darurat, di mana kolaborasi bersifat formalistik dan belum berjalan optimal.

Dari sisi pelibatan aktor, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di Kota Jambi telah berjalan cukup aktif, khususnya dengan adanya dukungan dari sektor swasta melalui program CSR, seperti yang dilakukan oleh Pegadaian. Hal ini menjadi pembeda dari studi Syafi'i (2020) di Kabupaten Sampang yang menunjukkan dominasi peran pemerintah dan minimnya partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini juga menyoroti manfaat ekonomi langsung yang dirasakan masyarakat dari program bank sampah, sedangkan studi Ain et al. (2021) mencatat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di Bali, meskipun sudah ada kerangka hukum yang mendukung.

Sementara itu, penelitian Amanda et al. (2024) dan Kurhayadi (2021) yang lebih relevan secara tematik, menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan masih belum mapan dan banyak bergantung pada komitmen individu aktor. Amanda menyoroti kelembagaan TPS3R yang belum mandiri, dan Kurhayadi mencatat kolaborasi semi-formal dalam program KangPisMan di Bandung. Dalam penelitian ini, kelembagaan kolaboratif sudah mulai terbentuk dengan dukungan regulasi seperti Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 dan instruksi wali kota, meskipun masih terdapat tantangan seperti lemahnya penegakan aturan, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi kebijakan melalui collaborative governance sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, arah penelitian di masa depan diharapkan dapat memperluas wilayah kajian ke daerah lain guna melakukan perbandingan kebijakan dan pendekatan pengelolaan sampah yang lebih beragam. Penggunaan metode campuran (mixed methods) juga dapat dipertimbangkan agar hasil penelitian lebih komprehensif, baik dari sisi pemahaman mendalam maupun pengukuran kuantitatif. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggali lebih dalam peran sektor swasta, LSM, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat dalam memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penting untuk menganalisis efektivitas regulasi dan insentif yang diterapkan, serta mengevaluasi bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program bank sampah secara lebih sistematis.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Bank Sampah Induk Dream Kota Jambi yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, H., Febrianto, I., & Ramadhani, M. (2024, March). UX evaluation of wastebank applications using user experience questionnaire. *In AIP Conference Proceedings* (Vol. 2927, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0192124>
- Ain, K. Q., Nasri, M. A., Alamsyah, M. N., Pratama, M. D. R., & Kurniawan, T. (2021, November). Collaborative governance in managing plastic waste in Bali. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 905, No. 1, p. 012115). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012115>
- Amanda, D., Muhammad, H. A., & Elsi, S. D. (2024). Collaborative Governance in Waste Management at the TPS3R Makmur Jaya KSM, Eka Jaya Subdistrict, Paal Merah District. *Journal of Governance and Public Affairs*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.22437/k93n0y18>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Budhijanto, W., Marleni, N. N. N., Wulaningtyas, A. H., Istiqomah, I., Ahmad, J. S. M., & Marbelia, L. (2024). Techno-economic analysis on community-based municipal solid waste processing facilities: A case study in Sleman Regency Indonesia. *Environmental Development*, 52, 101083. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101083>
- Creswell. (2018). A Mixed-Method Approach. *In Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>

- Daniati, A. (2023). *Strategi Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Protokol Madrid* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta). <http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/8>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Flick, U. (2009). *An Introduction to Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications, 47–74. https://elearning.shisu.edu.cn/pluginfile.php/35310/mod_resource/content/2/Research-Intro-Flick.pdf
- Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T. (2021). Analisis collaborative governance dalam implementasi kebijakan PSBB pada penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 155–169. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/download/12792/6726/46195>
- Kurhayadi. (2021). Collaborative Governance in Waste Management in Bandung City. *International Journal of Science and Society*, 3(4), 236–244. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v3i4.482>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Nurdin, I., & Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Pathuloh, A. (2022). *Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Garut* (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan). <http://repository.unpas.ac.id/57833/>
- Putri, S. D., Addini, J. T., & Heriyanti, A. P. (2022). Jeonju vs Semarang: Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. *Proceeding Seminar Nasional IPA XII*, 77–83. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snipa/article/view/1339>
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Rupita, R., Yulianti, Y., Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Herlan, H. (2021). Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1(3), 137–149. <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.8>
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, 03(03), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/35038>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung.

Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13120/0>

Syafi'i, M. (2020). *Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste Di Kabupaten Sampang* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). <https://repository.unair.ac.id/102925/>

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2024). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Widaningsih, S., & Suheri, A. (2021, February). Design of Waste Management System Using QR Code for Effective Management in Wastebank. *In Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1764, No. 1, p. 012066). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1764/1/012066>

